

**IMPLEMENTASI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA
TERHADAP PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN SISWA KELAS V
SDN MERGOASRI KECAMATAN PARENGAN
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

OLEH

SINGGIH WAHYU PRABOWO
NIM: 15220009



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO**

2019

**IMPLEMENTASI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA
TERHADAP PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN SISWA KELAS V
SDN MERGOASRI KECAMATAN PARENGAN
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada

IKIP PGRI Bojonegoro

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program sarjana

OLEH :

SINGGIH WAHYU PRABOWO

NIM: 15220009

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

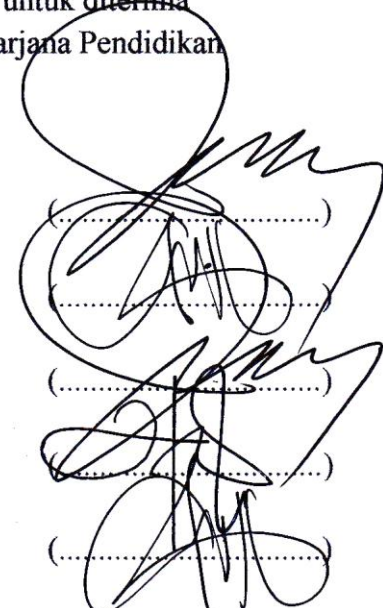
**“IMPLEMENTASI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP
PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN SISWA KELAS V SDN MERGOASRI
KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN”**

Oleh
SINGGIH WAHYU PRABOWO
NIM: 15220009

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 21 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Dewan Penguji

Ketua : Drs. Heru Ismaya, M.H
Sekretaris : Ernia Duwi Saputri, S.Pd.,M.H
Anggota : 1. Drs. Heru Ismaya, M.H
2. Dr. Ifa Khoiria Ningrum, M.M
3. Ernia Duwi Saputri, S.Pd.,M.H



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengesahkan:
Rektor,

Drs. Sujiran, M.Pd.
NIDN: 0002106302

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para pendiri negara (*founding fathers*) ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali (Winarno Narmoatmojo, 2010: 4). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan mediasi berupa sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi agar nilai-nilainya terlembaga secara ajeg baik bagi pribadi warga negara maupun kelompok masyarakat. Mediasi itu salah satunya melalui pendidikan.

Pendidikan memegang peranan penting untuk mempertahankan Pancasila. Dalam setiap jenjang pendidikan perlu diajarkan Pancasila. Perlu ditanamkan kepada anak didik pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Dalam kehidupan di sekolah misalnya, pembelajaran Pancasila di sekolah harus dilakukan dengan wujud perbuatan yang sesuai nilai-nilai Pancasila dan tidak hanya hafalan pada materi pembelajaran Pancasila. Materi pembelajaran Pancasila harus dapat menyentuh dan berpengaruh pada sikap dan perbuatan nyata dari siswa.

Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus pada Pendidikan Kewarganegaraan. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami banyak sekali pergantian dan perubahan. Perkembangan berikutnya, mata pelajaran "*Civics*" yang kemudian diganti menjadi "Kewargaan Negara" pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi "Pendidikan Kewargaan Negara". Di dalam kurikulum ini penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak (Aman dkk dalam Samsuri, 2004: 225). Barangkali di antara mata pelajaran lainnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang paling sering mengalami perubahan.

Sebelum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tahun 1975 ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1990 didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila yang sebenarnya lebih merupakan pendidikan budi pekerti daripada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya paradigma pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pola PMP atau PPKn menimbulkan kesan bahwa materi PMP atau PPKn dapat diajarkan oleh siapapun, meski bukan lulusan program studi PMP-KN/PPKn (Samsuri, 2009: 170). PPKn sangat menyolok dengan misi mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, menghargai, dan lain-lain yang dirasionalkan demi kepentingan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan nasional.

Keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan Kewarganegaraan semasa orde baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukan pembaharuan (Samsuri, 2011: 368). Pada era reformasi (pasca jatuhnya Soeharto), MPR melalui sidang umumnya, diantaranya menghasilkan ketetapan No: XVIII/MPR/1998 yang isinya mencabut Tap MPR No: II/MPR/1978 tentang P-4. Beberapa alasan Sidang Umum MPR mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978: 1) adanya indoktrinasi dari penguasa (Orde Baru); 2) hasil penataran P-4 tidak pernah diukur keberhasilannya; 3) penataran P-4 dianggap tidak berhasil, karena kenyataannya masih banyak penyimpangan dan penyelewengan di berbagai bidang pemerintahan; 4) P-4 dianggap anti demokrasi dengan asas tunggalnya, serta mengingkari keberagaman (pluralisme, ideologi, budaya dan agama) (Indri Djanarko, 2011: 1-2).

Penyelewengan pemerintahan Orde Baru itulah yang menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa bahkan ada anggapan Pancasila adalah label (simbol) politik Orde Baru. Samsuri (2011: 3) menyatakan bahwa dalam praktiknya penghayatan/pembentukan watak Pancasila bangsa cenderung indoktrinatif juga acapkali melahirkan tindakan hipokrit kolektif. Pencabutan P4 sebagai substansi kajian PPKn merupakan sebuah berkah, karena membebaskan beban ideologis-indoktrinatif dalam pembentukan warga negara yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SD hingga SMA diputuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Standar Isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn) untuk jenjang SD hingga SMA memuat delapan topik kajian yaitu: 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa; 2) Norma, hukum, dan peraturan; 3) Hak asasi manusia; 4) Kebutuhan warga negara; 5) Konstitusi Negara; 6) Kekuasaan dan Politik; 7) Pancasila; 8) Globalisasi (Daroeso, 1989:23).

Delapan topik Substansi Kajian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menunjukkan bahwa secara formal dan substansial terdapat pergeseran paradigma kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pergeseran ini tidak hanya memberikan harapan penting bagi kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang selaras dengan idealitas Pendidikan Kewarganegaraan demokratis yang telah berkembang dan masih terus dikembangkan di sejumlah negara demokratis (Samsuri, 2011: 373).

Tiap-tiap guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran sudah ada Standar Kompetensi yang dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi, sosial, dan kompetensi profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan pula bahwa Kompetensi Inti Guru butir 20 dari Kompetensi Profesional yaitu guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kompetensi inti guru tersebut untuk dijabarkan setiap guru mata pelajaran. Adapun Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK adalah sebagai berikut:

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam pembentukan warga negara yang baik, karena guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara langsung berinteraksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran. Guru Pendidikan Kewarganegaraan juga harus berperan sebagai pembimbing perjalanan, perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan emosional, kreatifitas, moral, spiritual yang lebih dalam dan kompleks serta berperan penting sebagai penasehat bagi peserta didik, sebagai model dan teladan bagi peserta didik.

Berdasarkan kegiatan pra observasi peneliti di sekolah-sekolah sampel menemukan fakta bahwa, implementasi pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN Mergoasri Kecamatan parengan Kabupaten Tuban pada umumnya masih banyak menitikberatkan *transfer of knowledge*. Guru Pendidikan Kewarganegaraan mengalami kesulitan membelajarkan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Akibatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang fungsional, menarik dan bermakna belum optimal. Akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap dan tindakan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Pengalaman Nilai-nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Kepribadian Siswa Kelas V SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2018/2019”.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimanakah implementasi pengalaman nilai-nilai pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2018/2019?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi pengalaman nilai-nilai pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2018/2019.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sebuah karya ilmiah diharapkan dapat memberikan motivasi bagi setiap individu dalam melaksanakan segala tindakan khususnya dalam pembentukan kepribadian siswa.
- b. Menambah wawasan tentang penguatan nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa kelas V SDN 1 Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam di bidang bimbingan belajar.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap sekolah guna meningkatkan penguatan nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa.
- b. Memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang penguatan nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa kelas V SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Bojonegoro tahun ajaran 2018/2019.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemaknaan beberapa istilah yang termuat dalam judul skripsi ini, maka perlu dibuat istilah berupa definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapinya dan menyelesaikannya. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : “implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapinya (Wahab, 2002: 95). Implementasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

2. Pengamalan

Pengamalan Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Siapapun yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus dituntut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila wajib dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia.

3. Nilai-nilai pancasila

Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada satu objek, jadi bukan objek itu sendiri yang dijadikan nilai. Nilai dipakai manusia sebagai landasan, motivasi, dan pedoman dalam segala perbuatan pada masa hidupnya. Nilai merupakan sesuatu yang dialami sebagai ajakan dari panggilan untuk kehidupan. Menurut Susanti (2013:71) “nilai dapat mendorong kita untuk bertindak serta mengarahkan perhatian, menarik kita ke jalur diri sendiri, dan nilai bersera kepada tingkah laku yang membangkitkan keaktifan”. Menurut Rukiyati (2013:51) “nilai adalah sesuat yang berharga, baik dan berguna bagi manusia atau suatu penentuan kualitas yang menyangkut jenis dan mianat serta menjadi dasar penentu tingkah laku manusia”. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai adalah kualitas atas penghargaan terhadap sesuatu hal, menarik, berguna, menguntungkan, dan dapat dipertahankan, sehingga nilai Pancasila nantinya akan terwujud suatu sistem nilai dalam Pancasila.

4. Pembentukan kepribadian

Pembentukan artinya “proses, perbuatan, cara membentuk”. Kepribadian memiliki beberapa arti seperti pernyataan “ ia memiliki banyak kepribadian” biasanya yang dimaksud pernyataan ini adalah daya tarik dan efektifitas social

orang tersebut. Pelatihan kepribadian biasanya dimaksudkan mengajarkan keterampilan sosial, meningkatkan penampilan, cara bicara yang menimbulkan reaksi menyenangkan orang lain. Kepribadian juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik individu yang mencolok seperti pernyataan “ ia memiliki kepribadian yang agresif” atau identitas psikis yang lain seperti pemalu dan pemberani.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1) Pembelajaran Nilai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Bab IV tentang Standar Proses Pasal 19 ayat (1) mendefinisikan proses pembelajaran sebagai berikut:

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Sasaran pembelajaran adalah merubah siswa yang belum terdidik menjadi manusia terdidik (proses transformasi), tujuannya adalah membantu seseorang atau siswa untuk belajar. Pembelajaran menyangkut pengertian, peningkatan dan penerapan metode-metode pembelajaran untuk mengoptimalkan proses pembelajaran atau memutuskan metode yang terbaik untuk mengantarkan pembelajaran kearah yang diinginkan.

Dasar setiap proses pembelajaran, sasaran utamanya adalah bagaimana agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang dipelajari.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran mengandung pengertian suatu interaksi antara pendidik dengan

peserta didik dalam memberikan sejumlah materi pelajaran yang telah diolah dari berbagai sumber agar peserta didik memiliki pengalaman belajar. Proses pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, maka guru dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

Muchson AR (2000: 16) mendefinisikan nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah value biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Kaelan (2002: 123), nilai itu pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi itu sendiri belum berarti sebelum dibutuhkan manusia, tetapi bukan berarti adanya esensi itu karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan daya tangkap dan pemaknaan manusia itu sendiri.

Definisi tentang pembelajaran nilai dirumuskan dari dua pengertian dasar yaitu pembelajaran dan nilai. Ketika kedua pengertian disatukan, maka keduanya menyatu dalam definisi pembelajaran nilai. Pembelajaran nilai adalah upaya untuk membantu peserta didik mengenal, menyadari akan pentingnya dan menghayati nilai-nilai yang pantas dan semestinya dijadikan

panduan dalam bersikap dan berperilaku baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, yang dicita-citakan dan mendasari prinsip dan norma yang memandu sikap dan perilaku orang dalam hidup. Kualitas seseorang sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati yang dijadikan acuan atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, alam sekitar, maupun dengan Tuhan. Kepribadian dan watak seseorang dibentuk oleh nilai-nilai yang dipilihnya, diusahakan, dan secara konsisten/ajeg yang diwujudkan dalam tindakan.

1. Model Pembelajaran Nilai

Pengajaran nilai-nilai politik dan sosial mungkin dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah kontinum strategi yang berkisar antara keterlibatan maksimal pada nilai-nilai dengan strategi pengajaran langsung dengan keikutsertaan minimal pada nilai-nilai dengan strategi pengajaran kurikulum tidak langsung. Kajian tentang pengajaran nilai dalam Murray Print (2009: 1008-1010), ada enam konsep model pengajaran nilai yaitu pengajaran langsung, pelibatan siswa, pendekatan perkembangan kognitif, perkembangan moral, pedagogi kritis, dan kurikulum tersembunyi. Enam konsep model pengajaran nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengajaran langsung

Merupakan pendekatan maksimal untuk pendidikan nilai-nilai sosial dan politik melalui pengajaran langsung atas nilai-nilai yang telah ditentukan. Halstead dan Taylor (dalam Murray Print, 2009: 1008) mencatat bentuk penyampaian nilai ini secara khusus didesain untuk

mempersiapkan warga negara yang baik untuk masa depan seperti persoalan tentang pendidikan karakter. Pendekatan ini secara khusus dapat diaplikasikan untuk pengajaran nilai-nilai politik dan sering digunakan oleh pemerintah dengan harapan untuk lebih secara langsung mengontrol warga negara mereka (Murray Print, 2009: 1008).

Penekanan pada metode pengajaran langsung adalah berupa ceramah, materi audio-visual, pembicara tamu, dan lain sebagainya. Pada dasarnya ini adalah metode pengajaran ekspositori. Di mana Print (dalam Murray Print, 2009: 1008) mengidentifikasi, terletak pada arus informasi satu arah kepada pembelajar. Walaupun banyak guru dan sekolah menyukai pendekatan ini, mereka sering secara ekstra memasukan bentuk pedagogis yang berbeda melibatkan para siswa lebih aktif. Dengan metode pengajaran langsung nilai-nilai yang secara sosial diterima, ditanamkan secara langsung sebagai landasan/dasar aturan atau standar perilaku yang dapat diterima. Guru bertanggung jawab untuk menjunjung nilai-nilai seperti perhatian, dan welas asih, berusaha maksimal (gigih), adil, kejujuran, dapat dipercaya, integritas, dan rasa hormat.

b. Pelibatan siswa

Metode ini menekankan pada penyediaan kesempatan untuk mempertimbangkan nilai-nilai, merefleksikan dan mempelajarinya, biasanya adalah guru dan kurikulum. Metode ini lebih sedikit kadar kelangsungannya bila dibandingkan dengan metode pengajaran langsung walaupun minat yang disengaja adalah untuk menunjukan

kepada siswa tentang nilai-nilai sosial dan politik yang spesifik. Ada beberapa metode yang telah dikenal untuk mengajarkan nilai-nilai politik dan sosial melalui pelibatan siswa termasuk diantaranya:

- 1) Simulasi: replikasi (tiruan) dari kenyataan yang disederhanakan
- 2) Bermain Peran: siswa memainkan peran, biasanya tanpa naskah pada situasi nilai yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari, misal: diskriminasi
- 3) Diskusi Kelompok: siswa berkontribusi untuk memandu diskusi tentang sebuah topik nilai
- 4) Masalah-Masalah Kritis/Kontroversial: secara spesifik diidentifikasi demi perhatian dan kemudian ditunjukkan biasanya melalui diskusi
- 5) Kajian Lapangan: aktivitas berbobot yang memuat nilai-nilai untuk mengunjungi/ melihat situasi nyata seperti gedung DPR

(Murray Print, 2009: 1008-1009).

c. Pendekatan perkembangan kognitif

Pendekatan perkembangan kognitif untuk mengajarkan nilai-nilai yang lebih umum pada tahun 1960an, 1970an dan 1980an. Pendekatan klarifikasi nilai-nilai dimana murid-murid terdorong untuk menggunakan pemikiran rasional dalam penentuan dan pembenaran fakta-fakta dan keyakinan-keyakinan penggunaan perintah yang membutuhkan kecakapan kognitif yang lebih tinggi dalam memperjelas dan menguji posisi suatu nilai adalah penting dan dianjurkan (Murray Print, 2009: 1009).

Walaupun pendekatan ini tidak umum digunakan pada saat ini, mereka masih dapat ditemukan dan sebagian sering diintegrasikan ke dalam strategi yang lebih tradisional. Contohnya adalah sebuah pedagogi dengan sebuah strategi agar siswa merefleksikan pada nilai-nilai mereka dan bagaimana mereka membentuk klarifikasi nilai dan diskusi kelas. Klarifikasi nilai adalah sebuah latihan pada realisasi diri (*self realization*). Eksplorasi dari nilai-nilai seseorang dan pembenaran dari posisi nilai tersebut. Strategi ini seakan-akan terletak menuju pada ujung minimalis dari kontinum, dengan pemasukan nilai-nilai secara tidak langsung yang sebagian besar meliputi sebuah pendekatan rasionalisasi individual.

d. Perkembangan moral

Perkembangan moral berfokus pada nilai-nilai moral terutama sekali keadilan. Perkembangan moral saat ini adalah sebuah pendekatan maksimal untuk mengejar nilai-nilai, menyandarkan diri pada menunjukkan/ menyampaikan secara langsung nilai-nilai yang lebih disukai, khususnya nilai-nilai sosial dan ditemukan paling baik dalam pendidikan karakter yang mencakup pengajaran yang disengaja tentang nilai-nilai sosial spesifik untuk mencapai tujuan nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya (Murray Print, 2009: 1009-1010).

2) Nilai-nilai Pancasila

1. Pengertian nilai

Muchson AR (2000: 16) mendefinisikan nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah value biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau

taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Kaelan (2002: 123), nilai itu pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi itu sendiri belum berarti sebelum dibutuhkan manusia, tetapi bukan berarti adanya esensi itu karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan daya tangkap dan pemaknaan manusia itu sendiri.

2. Pengertian nilai Pancasila

Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Mendasarkan pada perspektif teori fungsionalisme struktural, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*) (Winarno Narmoatmojo, 2010: 1).

Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukkan karakter bangsa yang hendak dibangun. Karakter, identitas atau jati diri sebuah bangsa

bukanlah sesuatu yang telah jadi. Karakter adalah hasil konstruksi dan produk dari pembudayaan melalui pendidikan.

Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Pancasila memberikan suatu arah dan kriteria yang jelas mengenai layak atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian terpenting penanaman nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan tidak hanya meliputi materi, tetapi juga sikap-sikap yang dibentuk dalam nilai Pancasila itu sendiri. Pasalnya, meskipun diberikan mata pelajaran itu, belum tentu anak tersebut menjadi seorang pancasilais. Saat ini sebagian besar orang hanya mengetahui rambu-rambu Pancasila, tetapi jarang sekali yang mengamalkan inti dari nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut.

Menurut Moerdiono (dalam Mulyono : 2-3) ada 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

- a. Nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan

dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

- b. Nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.
- c. Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud

penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan.

3. Pembahasan nilai-nilai pancasila

Pancasila sebagai suatu ideologi mengandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas atau isi dari sesuatu. Orang yang akan menilai berarti menimbang sesuatu. Artinya, suatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan.

Keputusan tersebut dapat menggambarkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religious atau tidak religious. Sesuatu dikatakan bernilai apabila ia mempunyai kegunaan, keberhargaan (nilai kebenaran), keindahan (nilai estetis), kebaikan (nilai moral atau etis) maupun mengandung unsur religious (nilai agama). Sesuatu yang bernilai akan selalu dihargai dan dihormati di manapun sesuatu itu berada. Suatu contoh, sebatang emas akan tetap menjadi barang yang dicari dan diminati orang banyak, walaupun berada di tempat yang kotor sekalipun, karena emas dianggap sebagai barang yang berharga. Demikian pula seseorang yang selalu mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan agama akan selalu

dihormati oleh orang lain karena orang itu mencerminkan nilai-nilai religius.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam Eko Widodo, Taufiqurrahman (2009:9) nilai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Di dalam nilai kerohanian itu sendiri dapat diperinci menjadi empat macam, yaitu:

- b) Nilai kebenaran/kenyataan, yaitu nilai yang bersumber dari pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta).
- c) Nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia.
- d) Nilai kebaikan atau nilai Moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia.
- e) Nilai religius, merupakan nilai ketuhanan, kerohanian tertinggi dan mutiak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Menurut (C.S.T Kansil 2011:56) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung dua pengertian pokok, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu zat yang

maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, tidak satu pun yang dapat menyamai-Nya, Dia dzat yang Mahasempurna. Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah:

- a) Adanya sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antar pemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi yang paling hakiki.
- f) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g) Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.
- h) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan

Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut:

- a) Mengakui dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan, suku, ras, keturunan, adat, status sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa (tepo seliro).
- d) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g) Berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terdiri dari dua kata yang penting yaitu persatuan dan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak pecah-belah. Sedangkan persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, secara lebih rinci sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a) Dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

- b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 - c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Untuk menjelaskan sila ini ada beberapa kata yang perlu dipahami, yaitu, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kerakyatan. Kerakyatan juga sering disebut kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah atau sering disebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hikmat kebijaksanaan mempunyai arti suatu sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan. Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan Negara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah:

- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
 - e. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
 - f. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - g. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial adalah keadaan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Artinya, keadilan itu tidak untuk golongan tertentu saja tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan kekayaan, jabatan maupun suku tertentu. Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah:

- a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain.

- c) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- d) Tidak menggunakan hak milik perorangan untuk memeras orang lain.
- e) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- f) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- g) Suka bekerja keras.
- h) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- i) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Tujuan yang hendak dicapai dari perumusan Pancasila adalah kualitas manusia Indonesia dan kualitas masyarakat Indonesia yang semakin maju dan berkembang. Berdasarkan berbagai pendapat yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila itu adalah memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila supaya dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan tujuan dari Pancasila yaitu menjadikan manusia dan masyarakat Indonesia berkualitas dan dapat menjadikan Indonesia semakin maju dan berkembang.

3) Pengamalan Pancasila

1. Pengertian

Pengamalan berasal dari kata amal yang berarti perbuatan atau pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang diamalkan (WJS Poerwadarminto, 1985: 33). Pengamalan adalah proses perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, tugas atau kewajiban.

2. Pengamalan Pancasila

Pengamalan Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Siapapun yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus dituntut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila wajib dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia, berikut ini adalah uraian singkat dari Pancasila:

b. Pengertian Pancasila

1) Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sanskerta dari India (bahasa kasta Brahmana) dan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta "Pancasila" memiliki dua macam arti (Noor MS Bakry, 2010: 14) yaitu:

a) Panca artinya lima dan syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, azas atau dasar, jadi jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki lima unsur.

- b) Panca artinya lima dan syiila (vokal i panjang) artinya peraturan tingkah laku, yang penting atau yang senonoh, jadi jika dirangkai menjadi lima aturan tingkah laku yang penting.
- 2) Secara historis ada beberapa alur yang meriwayatkan singkat Pancasila baik dari segi istilah maupun proses perumusan sampai menjadi dasar negara yang sah, berikut ini adalah prosesnya (Hamid Darmadi, 2014: 240):
- a. Perumusan dari sidang BPUPKI pertama Dr Radjiman Widjoningrat mengajukan permasalahan rumusan dasar negara Indonesia yang diisi tiga pembicara yaitu Mr Mochamad Yamin, Dr Soepomo dan Ir Soekarno.
 - b. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato secara lisan mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila.
 - c. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan
 - d. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan pada alinea IV terdapat rumusan lima prinsip dasar negara.

Meskipun dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tidak menyebutkan istilah Pancasila, akan tetapi dalam rangkaian pembentukan rumus dasar Negara secara langsung diterima oleh peserta sidang.

3) Secara terminologi atau berdasarkan isi istilahnya, Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi dasar Negara. Secara yuridis dan dalam Bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut (Noor MS Bakry, 2010: 18) :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Nilai luhur Pancasila

1) Ditinjau dari segi subyektif, nilai luhur Pancasila disebut Ekaprasetya Pancakarsa atau tekad tunggal untuk melaksanakan lima kehendak untuk manusianya dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan Rakyat Indonesia bukan pedoman untuk negaranya yang berbunyi : (Noor MS Bakry, 2010: 70-73)

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

- 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - 4) Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
 - 3) Saling mencintai sesama manusia
 - 4) Mengembangkan sikap tenggang rasa
 - 5) Tidak semena-mena terhadap orang lain
 - 6) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
 - 8) Berani membela kebenaran dan keadilan
- c. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan orang lain
- d. Sila Persatuan Indonesia
- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
 - 3) Cinta tanah air dan bangsa
 - 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertahan air Indonesia

- 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
- e. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
 - 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 - 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 - 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - 5) Dengan itikat baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
 - 6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur.
 - 7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- f. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
 - 2) Bersikap adil
 - 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

- 4) Menghormati hak-hak orang lain
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain
- 6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
- 7) Tidak bersifat boros
- 8) Tidak bergaya hidup mewah
- 9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- 10) Suka bekerja keras
- 11) Menghargai hasil karya orang lain
- 12) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemampuan yang merata dan berkeadilan sosial.

2) Nilai-Nilai Luhur Pancasila ditinjau dari segi obyektif

Nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan bernegara. Berikut ini adalah uraian dari nilai-nilai Pancasila : (Noor MS Bakry, 2010:305-307).

- a. Sila pertama dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai religius seperti yang diuraikan sebagai berikut:
 - i. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-Nya Yang Maha Sempurna.
 - ii. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

- iii. Kepercayaan adanya nilai-nilai dari ajaran agama yang harus ditaati demi kebahagiaan hidup manusia.
 - iv. Nilai ketuhanan sebagai nilai religius meliputi dan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
- b. Sila kedua dengan rumusan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai kemanusiaan seperti yang diuraikan sebagai berikut:
- i. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak asasinya.
 - ii. Perlakuan adil terhadap sesama dengan memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya.
 - iii. Manusia beradab dengan cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai hidup manusiawi.
 - iv. Nilai kemanusiaan diliputi dan dijiwai ketuhanan serta meliputi dan menjiwai persatuan, kerakyatan dan keadilan.
- c. Sila ketiga dengan rumusan ”Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dan kebangsaan seperti yang diuraikan sebagai berikut:
- i. Persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia dengan dasar cita-cita hidup bersama.
 - ii. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

- iii. Semangat ke”Bhineka Tunggal Ika”an suku bangsa untuk memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.
 - iv. Nilai persatuan diliputi dan dijiwai ketuhanan dan kemanusiaan, meliputi dan menjiwai kerakyatan dan keadilan.
- d. Sila keempat dengan rumusan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengandung nilai kerakyatan seperti yang diuraikan sebagai berikut:
- i. Kedaulatan negara di tangan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berlandaskan penalaran yang sehat
 - ii. Manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - iii. Musyawarah mufakat dalam kenegaraan oleh wakil-wakil rakyat demi kebersamaan dengan dasar kekeluargaan.
 - iv. Nilai kerakyatan diliputi dan dijiwai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan serta meliputi dan menjiwai keadilan.
- e. Sila kelima dengan rumusan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung nilai keadilan sosial seperti yang diuraikan sebagai berikut:
- i. Keadilan dalam kehidupan sosial meliputi semua bidang nasional untuk seluruh rakyat.

- ii. Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
- iii. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta cinta kemajuan dan pembangunan yang selaras serasi dan seimbang.
- iv. Nilai keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan.

Dari tinjauan sudut pandang yang berbeda ini, mempunyai sikap yang sama dalam melihat nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan dasar filsafat Negara yang mempunyai konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang berhubungan antarsila dalam Pancasila.

Jika hubungan antarsila ini dapat berjalan dengan semestinya, maka hubungan antarwarga negara dan warga negara dengan negaranya akan menciptakan suasana kondusif dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya wajib diajarkan sedini mungkin.

d. Hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya yang meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik atau hak-hak dasar lain yang melekat pada

diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain (Hamid Darmadi, 2014: 88).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (R. Wiyono, 2006: 147).

Komisi Hak Asasi Manusia sudah menyatakan pernyataan internasional yang disetujui oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan negara yang disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif (Hamid Darmadi, 2014: 119).

Sedangkan di Indonesia, hak dan kewajiban warganegara diatur dalam batang tubuh UUD 1945, misalnya hak untuk mendapat pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran (Hamid Darmadi, 2014: 240).

Kemudian di dalam pendidikan diajarkan materi khusus tentang hak dan kewajiban warganegara, baik itu secara global atau sudah dispesifikasikan seperti hak dan kewajiban di sekolah. Selain itu, Dr.T.S.N.Sastry, dalam jurnalnya yang berjudul *Introduction to Human Right and Duties* menjelaskan bahwa:

“Rights are important in developing the human personality and behavior. The duties on the other hand, direct the individuals importance of their contribution for the promotion of social good. In a way duty targets at the realization of rights guaranteed by various laws and regulations both nationally and internationally” (Santry Dr.T.S, 2012).

Berikut ini adalah uraian dari hak dan kewajiban di sekolah:

a. Pengertian Hak

Hak atau hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan rakyat dan martabat manusia.

b. Landasan Hukum Hak Peserta Didik

Menurut UUD 1945, hak warga negara dilindungi oleh negara. Di bidang pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran” (Kaelan, 2010: 117).

Kemudian pasal tersebut dijadikan salah satu pedoman untuk memperinci hak di bidang pendidikan, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur hak dan kewajiban peserta didik dan diatur dalam BAB V yang membahas Peserta Didik pada pasal 12.

Berikut ini adalah uraian dalam BAB V yang membahas Peserta Didik pada pasal 1216 :

- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
 - c) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - e) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

2) Setiap peserta didik berkewajiban

a) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

b) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

c) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adanya dasar hukum yang mengatur hak tersebut, diharapkan menimbulkan timbal balik dan membentuk partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Peran serta

masyarakat dalam pendidikan diatur dalam pasal 54 yang menyebutkan bahwa :

- 2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- 3) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanaan, dan pengguna hasil pendidikan.
- 4) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih dengan peraturan pemerintah.

e. Hidup rukun

Negara merupakan persatuan hidup bersama antara beberapa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama yang harus bersatu dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Nilai Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jadi, sikap nasionalisme berdasarkan moral Ketuhanan yang Maha Esa dan humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan itu yang diharapkan. Selain itu, sila ke-3 merupakan kutipan dari pidato Bung Karno yang menyebutkan bahwa : (Abdul Karim, 2007: 94-95).

Telah saya sebutkan bahwa bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika terdiri atas jutaan manusia dan mendiami ribuan pulau yang merupakan kesatuan, karena bangsa Indonesia sering disebut sebagai bangsa yang merupakan kesatuan dan persatuan. Persatuan karena terdiri atas berbagai unsur dan kesatuan karena dia tidak dapat terpecah-pecah, dia adalah satu kebulatan.

Dari pidato Bung Karno tersebut terlihat bahwa harapan besar bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa yang mempunyai kesatuan dan persatuan serta bisa hidup rukun berdampingan menjalin kehidupan harmonis dan saling menghargai satu dengan lainnya, sehingga tercipta hidup rukun antarwarga negara.

Hal ini harus diajarkan sejak dini, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, salah satu masalah yang bisa mengganggu stabilitas nasional yaitu masalah toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mantan menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali berpendapat bahwa kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia bukan lagi pilihan.

Selain itu agama di Indonesia berhasil dijadikan motor penggerak dalam mencapai kemerdekaan bangsa dan dapat dijadikan penggerak dalam memacu gerak laju pelaksanaan pembangunan di Indonesia (Faisal Ismail, 1999: 205).

f. Hubungan antara Pancasila dan hak dengan hidup rukun

Pancasila dan hak dengan hidup rukun merupakan 2 objek kajian yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan karena Pancasila

merupakan objek kajian Pendidikan Moral Pancasila sedangkan hak dan hidup rukun adalah kajian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut ini adalah perbedaan dari Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan : (Hamid Darmadi, 2014: 173).

1. Pendidikan Moral Pancasila merupakan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks UUD 1945. Jadi bukan hanya mewarganegarakan tapi yang di Pancasilakan adalah watak, sifat, dan amalnya sehingga terbentuk manusia yang Pancasilais atau manusia yang bersifat demokratis, berbudi luhur dan cinta sesama manusia, dan lain-lain.
2. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang membina anak didik untuk menjadi warga negara yang baik supaya mereka mampu menyadari potensi dan harga dirinya sebagai warga negara dengan cara mengerti hak dan kewajiban dalam bidang kehidupan antara manusia dan lembaga.

Namun keduanya mempunyai titik temu yang menyebabkan pendidikan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, seperti keduanya membentuk warga negara yang baik sedangkan Pendidikan Moral Pancasila ditambah warga negara yang Pancasilais atau mempunyai jiwa pembangun.

Jadi, jika kedua pendidikan ini mampu dikolaborasikan dalam pembelajaran maka pelaksanaan hidup rukun pun akan berjalan dengan baik karena yang terlibat dalam sosialisasi tersebut adalah warnanegara yang baik dan Pancasilais.

4) Kepribadian

1. Pengertian

Menurut Yinger (Horton dan Hunt, 1999: 90) kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang beraksi dengan serangkaian situasi, dengan kata lain kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian

Kepribadian terbentuk, berkembang, dan berubah seiring dengan proses sosialisasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Warisan Biologis dan Kepribadian (M, Indianto. 2004: 124). Sebuah rumah bata tidak dapat dibangun dari batu atau bambu; tetapi dari setumpuk bata berbagai macam rumah dapat dibangun. Warisan/bawaan biologis menyediakan bahan mentah kepribadian, dan bahan mentah ini dapat dibentuk dengan dan dalam berbagai cara. Semua manusia yang normal dan sehat mempunyai persamaan biologis tertentu, seperti mempunyai dua tangan, pancaindera, kelenjar seks, dan otak yang rumit. persamaan biologis ini membantu menjelaskan beberapa persamaan dalam kepribadian dan perilaku semua orang.

Setiap warisan biologis seseorang juga bersifat unik, yang berarti, bahwa tidak seorang pun (kecuali anak kembar) yang

mempunyai karakteristik fisik yang sama. Belum berapa lama banyak orang percaya bahwa kepribadian seseorang tidak lebih dari sekedar penampilan warisan biologisnya. Karakteristik kepribadian seperti ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, kelainan seksual, dan ciri yang lain dianggap timbul dari kecenderungan-kecenderungan turunan. Dewasa ini tidak banyak lagi yang masih mempercayai anggapan ini. Malah, sekarang diketahui bahwa karakteristik kepribadian dibentuk oleh pengalaman. Sebenarnya beberapa orang mengklaim bahwa perbedaan individual dalam kemampuan, prestasi, dan perilaku hampir semuanya berhubungan dengan lingkungan, dan bahwa perbedaan individu dalam warisan biologis tidak begitu penting.

Untuk beberapa ciri, warisan biologis lebih penting daripada yang lain. Misalnya, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa IQ anak angkat lebih mirip dengan IQ orang tua kandungnya daripada dengan orang tua angkatnya, dan dalam keluarga tertentu anak kandung lebih mengikuti IQ orang tuanya daripada anak angkat. Namun, meskipun perbedaan individual dalam IQ tampaknya lebih banyak ditentukan oleh keturunan daripada oleh lingkungan, banyak perbedaan yang lainnya ditentukan oleh lingkungan.

Suatu studi baru-baru ini menemukan bukti bahwa faktor keturunan berpengaruh kuat terhadap keramah-tamahan, perilaku kompulsif dan kemudahan dalam pergaulan sosial, tetapi faktor keturunan tidak begitu penting dalam kepemimpinan, pengendalian

dorongan impulsif, sikap, dan minat. Dua studi barubaru ini menyimpulkan bahwa perang masa kanak-kanak, khususnya rasa malu, berakar pada warisan biologis. Jadi kita boleh menyimpulkan bahwa warisan biologis penting dalam beberapa ciri kepribadian dan kurang penting dalam hal-hal lain. Tidak ada kasus yang dapat mengukur pengaruh keturunan dan lingkungan dengan tepat, tetapi banyak ilmuwan sependapat bahwa apakah potensi warisan seseorang berkembang sepenuhnya, sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial orang itu.

- b. Lingkungan Fisik dan Kepribadian (Soeroso, 2006: 93). Beberapa manusia yang paling dini berusaha menerangkan perilaku manusia dalam hubungannya dengan iklim dan geografi. Sorokin menyimpulkan teori beratus-ratus penulis dari Conficius, Aristoteles, dan Socrates sampai kepada ahli geografi modern Ellsworth Huntington, yang menekankan bahwa perbedaan perilaku kelompok terutama disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, dan sumber alam. Teori tersebut sesuai benar dengankerangka etnosentris, karena geografi memberikan keterangan yang cukup baik dan jelas objektif terhadap kebajikan nasional dan sifat-sifat buruk orang lain.

Lingkungan fisik merupakan suatu faktor minor dalam evolusi kebudayaan, bahkan tidak begitu penting dalam perkembangan kepribadian. Praktisnya segala jenis kepribadian dapat ditemui dalam setiap jenis iklim. Benar, bahwa lingkungan fisik

mempengaruhi kepribadian. Bangsa Athabascans memiliki kepribadian yang dominan yang menyebabkan mereka dapat bertahan hidup dalam iklim yang lebih dingin daripada daerah Arctic.

Orang pedalaman Australia harus berjuang dengan gigih untuk tetap hidup, padahal bangsa Samoa hanya memerlukan sedikit waktu setiap harinya untuk mendapatkan lebih banyak makanan daripada yang bisa mereka makan. Malah sekarang beberapa daerah hanya dapat menolong sebagian kecil penduduk yang tersebar sangat jarang, dan kepadatan penduduk mempengaruhi kepribadian. Suku Ik dari Uganda sedang mengalami kelaparan secara perlahan, karena hilangnya tanah tempat perburuan tradisional, dan menurut Turnbull mereka menjadi sekelompok orang yang paling tamak, paling rakus di dunia, sama sekali tidak memiliki keramahan tidak suka menolong atau tidak mempunyai rasa kasihan, malah merebut makanan dari mulut anak mereka dalam perjuangan mempertahankan hidup. Suku Quolla dari Peru digambarkan oleh Trotter sebagai sekelompok orang yang paling keras di dunia, dan ia menghubungkan hal ini dengan hipoglikemia yang timbul karena kekurangan makanan. Jelas lingkungan fisik mempengaruhi kepribadian dan perilaku.

- c. Kebudayaan dan Kepribadian (Soeroso, 2006: 95). Beberapa pengalaman adalah umum bagi seluruh kebudayaan. Di mana-mana bayi dipelihara atau diberi makan oleh orang yang lebih tua, hidup dalam kelompok, belajar, berkomunikasi melalui bahasa, mengalami

hukuman dan menerima imbalan/ pujian dan semacamnya, serta mengalami pengalaman lain yang umum dialami oleh jenis manusia. juga-benar bahwa setiap masyarakat sebenarnya memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan oleh masyarakat lain kepada anggotanya. Dari pengalaman sosial yang sebenarnya yang umum, bagi seluruh anggota masyarakat tertentu timbullah konfigurasi kepribadian yang khas dari anggota masyarakat tersebut. Du Bois telah menyebutnya sebagai "modal personality" diambil dan istilah statistic "mode" yang mengacu pada suatu nilai yang paling sering timbul dalam berbagai seri.

Sejak saat kelahiran, seorang anak diperlakukan dalam cara-cara yang membentuk kepribadian. Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat pengaruh umum, yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Linton: "Dalam beberapa (masyarakat) bayi-bayi hanya diberi menetek bila mereka menangis. Dalam masyarakat lain mereka diberi minum menurut jadwal yang teratur. Dalam beberapa masyarakat mereka dirawat oleh setiap wanita yang kebetulan siap, dalam masyarakat lain mereka dirawat hanya oleh ibunya sendiri. Dalam beberapa masyarakat, proses perawatan bayi merupakan kegiatan santai yang disertai oleh elusan-elusan dan kenikmatan indrawi yang penuh untuk ibu dan anak. Dalam masyarakat lain perawatan bayi bukan merupakan kegiatan yang memerlukan waktu khusus dan santai. Ibu memandang kegiatan ini

sebagai interupsi kegiatan teraturnya dan mendesak anaknya untuk menyelesaikannya secepat mungkin.

Beberapa kelompok menyapih bayi pada usia dini; yang lain melanjutkan sampai beberapa tahun”. Kembali kepada pengaruh kebudayaan yang lebih langsung pada individu yang sedang berkembang, kita memiliki sederetan variasi yang tidak terbatas dalam tingkatan di mana ia dididik secara sadar, diberi atau tidak diberi disiapkan dan tanggung jawab yang dibebankan terhadapnya secara sadar.

Masyarakat bisa merawat anak itu sejak dari masa bayi dan melatihnya dengan bebas untuk masa dewasanya, atau masyarakat bisa membiarkan anak itu liar sampai usai pubertas. Ia mungkin mendapat hukuman badani untuk kesalahan kecil sekalipun. Sebagai seorang anak ia bisa menuntut waktu dan perhatian dari semua orang dewasa dengan siapa ia berhubungan atau sebaliknya semua orang dewasa menuntut pelayanannya. Ia bisa dipaksa bekerja dan diperlakukan sebagai seorang anggota kelompok keluarga yang harus ikut bertanggung jawab hampir sejak ia mampu berjalan dan kepadanya selalu ditekankan bahwa hidup adalah nyata dan sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, dalam beberapa suku Madagaskar, anak-anak tidak saja mtilai bekerja pada usia yang sangat muda, tetapi juga menikmati hak-hak memiliki yang penuh. Saya sering tawar-menawar dengan seorang anak usia 6 tahun untuk beberapa benda yang saya perlukan sebagai koleksi saya; meskipun orang tuanya

mungkin memberi nasehat, mereka tidak akan turut campur. Di pihak lain anak-anak di kampung Marqueas tidak bekerja dan tidak menerima tanggung jawab. Mereka membentuk kesatuan sosial yang sangat terpadu dan berbeda dan hampir tidak berhubungan dengan orang dewasa. Anak laki-laki dan perempuan di bawah usia puber selalu bersama-sama dan sering tidak pulang bahkan untuk makan atau tidur. Mereka bepergian seharian tanpa izin orang tua, menangkap ikan dan mencari tanaman untuk makan, dan bermalam dalam rumah siapa saja yang kebetulan dekat ketika malam tiba.

Contoh-contoh perbedaan kebudayaan semacam itu dalam perlakuan terhadap anak-anak dapat diperbanyak tanpa batas. Hal yang penting adalah bahwa setiap kebudayaan menekankan serangkaian pengaruh umum terhadap individu yang tumbuh di bawah kebudayaan itu. Pengaruh-pengaruh ini berbeda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain, tetapi semuanya merupakan denominator pengalaman bagi setiap orang yang termasuk ke dalam masyarakat tertentu (Horton dan Hunt. 1987: 107).

- d. Kebudayaan khusus dan kepribadian. (Tim Sosiologi, 2007: 86).
 Gambaran kepribadian modal bagi setiap masyarakat berlaku secara umum bagi masyarakat yang sederhana dengan kebudayaan yang terpadu dengan baik, Namun, dalam masyarakat yang kompleks dengan beberapa kebudayaan khusus, gambaran tersebut berubah. Adakah perbedaan kepribadian di antara orang-orang Jawa dan orang

Amerika? Apakah petani gurem berfikir dan merasa seperti ahli-ahli dari kota? Dalam masyarakat yang kompleks mungkin banyaknya kepribadian modal sama dengan banyaknya kebudayaan khusus.

- e. Pengalaman Kelompok dan Kepribadian (M, Indianto, 2004: 126). Anggota kelompok yang lain cukup penting perannya bagi individu dalam mengembangkan kepribadian yang positif. Kelompok sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seseorang dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Kelompok Acuan (*Reference Group*)

Sepanjang hidup seseorang kelompok-kelompok tertentu adalah penting sebagai model untuk gagasan atau norma-norma perilaku seseorang. Kelompok semacam itu disebut kelompok acuan (*reference group*). Mula-mula kelompok keluarga adalah kelompok yang terpenting, karena kelompok ini merupakan kelompok satu-satunya yang dimiliki bayi selama masa-masa yang paling peka. Semua yang berwenang setuju bahwa ciri-ciri kepribadian dasar dari individu dibentuk pada tahun-tahun pertama ini dalam lingkungan keluarga. Beberapa waktu kemudian, kelompok sebaya/ sepersamaan (*peer group*), yakni kelompok lain yang sama usia dan statusnya, menjadi penting sebagai suatu kelompok racuan. Kegagalan seorang anak untuk mendapatkan pengakuan sosial dalam kelompok sepersamaan sering diikuti oleh pola penolakan sosial dan kegagalan sosial seumur hidup. Apabila seorang belum memiliki ukuran yang

wajar tentang penerimaan kelompok sebaya adalah sulit, kalau tidak dapat dikatakan mustahil, bagi seorang untuk mengembangkan gambaran diri yang dewasa sebagai seseorang yang berharga dan kompeten, karena alasan ini maka para guru dan konsultan telah mencurahkan upaya mereka untuk membantu wanita pasif meningkatkan tingkat penerimaan dalam kelompok sebaya/ sepersamaan.

Pada usia 15 tahunan kelompok sebaya telah menjadi kelompok referensi yang sangat penting dan barangkali merupakan pengaruh yang paling penting terhadap sikap, tujuan serta norma perilaku. Sebagai contoh. Reaksi anak belasan tahun yang menuakan "oh, ibu!" dengan jelas menandakan seringnya terjadi pertentangan antara norma orang tua dengan norma remaja dimana norma orang tua seringkali sebagai pihak yang kalah. Proses menuju kematangan, suatu pergantian kelompok referensi timbul dan hilang. Kerumunan anak SLTA mulai berpecah-belah, dan para siswa memasuki perguruan tinggi di mana mereka menilai prestasi akademisnya terhadap prestasi teman sekelas mereka. Gambaran para pekerja mengenai kompetensi mereka mungkin akan lebih tergantung pada persepsi mereka tentang bagaimana mereka dilihat oleh teman sekerja mereka daripada persepsi mengenai bagaimana mereka dilihat oleh para pengawas mereka, yang berarti bahwa rekan sekerja adalah suatu kelompok referensi yang lebih penting daripada pengawas.

Hanya beberapa dari ratusan kemungkinan kelompok referensi yang menjadi penting bagi setiap orang dan dari evaluasi kelompok ini gambaran diri seseorang secara terus-menerus dibentuk dan diperbaharui.

2) Kelompok Majemuk Dan Sosialisasi

Masyarakat yang kompleks/ majemuk memiliki banyak kelompok dan kebudayaan khusus dengan standar yang berbeda dan kadangkala bertentangan. Seseorang dihadapkan pada model-model perilaku yang pada suatu saat diimbali sedang pada saat lain dicela atau disetujui oleh beberapa kelompok dan dikutuk oleh kelompok lainnya. Dengan demikian seorang anak akan belajar bahwa ia harus "tangguh" dan mampu untuk "menegakkan haknya", namun pada saat yang sama ia pun harus dapat berlaku tertib, penuh pertimbangan dan rasa hormat. Sebagian orang mengingatkan seorang remaja putri untuk mempertahankan kemurniannya sedangkan yang lain mendorongnya "beremansipasi". Dalam suatu masyarakat dimana setiap orang bergerak dalam sejumlah kelompok dengan standar nilai yang berbeda, setiap orang harus mampu menemukan cara untuk mengatasi tantangan-tantangan yang serba bertentangan. Manusia dapat mengatasi masalah ini dengan mengkompartementalisasi kehidupan mereka, mengembangkan suatu "diri" yang berbeda bagi setiap kelompok di mana mereka bergerak. Atau mereka dapat memilih kelompok referensi

yang mereka sukai yang sesuai dengan kehidupan nyata mereka, menolak kelompok-kelompok lainnya.

Studi riset Warner and Lunt pada (Horton dan Hunt, 1999: 112) biasanya menekankan kekuatan kelompok sebaya untuk menanamkan corak perilaku yang bertentangan dengan perilaku keluarganya. Akan tetapi, tidak semua remaja menerima bidet-bidet standar kelompok sebaya dan tidak semua kelompok sebaya benar-benar konflik dengan keluarga atau masyarakat. Kebanyakan remaja menemukan kesetiaan kelompok yang utama dalam tim atletik, kelompok remaja gereja, klub tetangga, atau klik remaja dalam harmoni dengan standar suatu masyarakat dewasa yang konvensional. Dalam tahun-tahun belakangan ini telah banyak tulisan tentang "pemberontakan kaum muda" dan "kesenjangan generasi". Namun, survei yang cermat menunjukkan bahwa sekalipun terdapat suatu dorongan kuat untuk suatu perubahan di kalangan remaja masa kini, namun pada dasarnya mereka dapat menyetujui nilai-nilai dasar orang tua.

Mengapa beberapa remaja memilih kelompok sebaya yang umumnya mendukung nilai-nilai kalangan dewasa sedangkan yang lainnya memilih kelompok sebaya yang menentang masyarakat dewasa? Tampaknya pilihan mereka bertalian dengan gambaran diri. Remaja yang nakal biasanya adalah remaja yang merasa dirinya tidak dicintai, tidak berharga, tidak berkemampuan, tidak diakui, tidak dihargai, mereka bergabung

dengan remaja brandal lainnya dalam suatu kelompok sebaya yang nakal yang memperkuat dan mendukung perilaku yang bersifat membenci dan agresif. Remaja yang patuh merasa diri mereka dicintai, berharga, mampu, diakui, dihargai; mereka bergabung dengan orang-orang yang lain yang merasakan hal yang sama seperti mereka dalam suatu kelompok sebaya yang seialan, yang memperkuat perilaku yang secara sosial disetujui. Sesungguhnya melihat adalah berperilaku. Bagaimana kita melihat diri kita, begitulah kita berperilaku.

f. Pengalaman yang unik dan Kepribadian (Tim Sosiologi, 2007: 87)

Mengapa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sama sedemikian berbeda satu dengan yang lainnya, sekalipun mereka pernah mendapatkan pengalaman yang sama? Masalahnya adalah karena mereka tidak mendapatkan pengalaman yang sama; mereka pernah mendapatkan pengalaman yang serupa dalam beberapa hal dan berbeda dalam beberapa hal lainnya. Setiap anak memasuki suatu unit/kesatuan keluarga yang berbeda. Anak yang dilahirkan pertama, yang merupakan anak satu-satunya sampai kelahiran anak yang kedua, kemudian akan mempunyai adik laki-laki atau perempuan dengan siapa ia dapat bertengkar. Orang tua berubah dan tidak memperlakukan sama semua anak nya, anak-anak memasuki kelompok sebaya yang berbeda, mungkin mempunyai guru yang berbeda dan berhasil melampaui peristiwa yang berbeda pula. Sepasang anak kembar mempunyai warisan

(heredity) yang identik dan (kecuali bila dipisahkan lebih cenderung memperoleh pengalaman yang sama. Mereka berada dalam suatu keluarga bersama-sama, seringkali mempunyai kelompok sebaya yang sama, dan diperlakukan kurang lebih sama oleh orang lain, akan tetapi bahkan anak kembar pun tidak mengalami bersama seluruh peristiwa dan pengalaman.

Pengalaman setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapa pun yang secara sempurna dapat menyamainya. Suatu inventarisasi dari pengalaman sehari-hari berbagai anak-anak dalam suatu keluarga yang sama akan mengungkapkan banyaknya perbedaan. Maka setiap anak (kecuali anak kembar yang identik) mempunyai warisan biologis yang unik. yang benar-benar tidak seorang pun dapat menyamainya, dan demikian pula halnya, suatu rangkaian pengalaman hidup yang unik tidak dapat benar-benar disamai oleh pengalaman siapa pun.

Lebih lanjut, pengalaman tidaklah sekedar bertambah akan tetapi menyatu. Kepribadian tidaklah dibangun dengan menyusun suatu peristiwa di atas peristiwa sebagaimana membangun tembok bata. Arti dan pengaruh suatu pengalaman. tergantung pada pengalaman-pengalaman yang mendahuluinya. Bagi seorang gadis pengalaman berdiri di camping teman kencan, tidaklah sama dengan berdiri di samping tembok. Para Psikoanalisis menyatakan bahwa peristiwa tertentu dalam pengalaman seseorang adalah penting sekali karena peristiwa tersebut mewarnai reaksi seseorang atas pengalaman berikutnya.

Film-film dan novel yang berbau "psikologis" seringkali menyetengahkan bahwa psikoanalisis menyangkut pemeriksaan terhadap ketidaksadaran seseorang dan menggali pengalaman traumatis yang menyebabkan segala kesukaran. Hal ini penyederhanaan yang berlebihan. Tidak akan tumbuh neurasis pada seorang anak laki-laki karena ayahnya merusak mamam kesukaannya pada waktu berumur 3 tahun. Akan tetapi, mungkin saja bahwa suatu episode traumatic akan menjadi awal dari serangkaian pengalaman yang saling menolak dan karenanya mewarnai arti dari sekian banyak pengalaman berikutnya. Ini berarti bahwa pengalaman setiap orang merupakan suatu jaringan yang luar biasa, rumitnya dari jutaan peristiwa di mana masing-masing memperoleh arti dan pengaruh dari semua pengalaman yang telah mendahuluinya. Maka sungguh tidak heran kalau kepribadian itu rumit (M, Indianto. 2004: 126).

Pada keluarga-keluarga besar seorang anak mungkin menemui kesulitan dalam mendapatkan suatu peran yang tidak berkaitan dengan kakak-kakaknya, jadi dalam hubungan ini dan dalam banyak hal lainnya setiap pengalaman hidup seseorang adalah unik. Unik dalam pengertian tidak seorang pun mengalami serangkaian pengalaman seperti ini dengan cara yang persis sama dan unik dalam pengertian bahwa tidak seorang pun mempunyai latar belakang pengalaman yang sama atas mana setiap peristiwa baru akan menimbulkan pengaruh dan dari mana akan dapat diperoleh suatu.

3. Teori-teori perkembangan kepribadian

Beberapa sarjana telah lebih mengembangkan beberapa teori perkembangan kepribadian yang menarik. Namun, tidak ada satu teori pun yang dibuktikan oleh semacam bukti empiris atau eksperimen riset yang menetapkan, misalnya, bahwa bakteri menyebabkan penyakit atau bahwa kepercayaan diri meningkatkan prestasi. Setiap teori merupakan teori yang provokatif yang menerangkan persoalan yang rumit dalam cara yang dapat dipercaya.

a. Cooley dan Cermin diri (Damsar, 2011: 80)

Bagaimanakah sebenarnya seseorang sampai pada paham mengenai orang seperti apakah dia itu? Konsep diri berkembang melalui proses yang bertahap dan rumit yang berlangsung seumur hidup. Konsep tersebut adalah suatu gambaran bahwa seseorang hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Misalkan seorang orang tua dan keluarganya mengatakan bahwa anak gadisnya cantik. Kalau hal ini cukup sering diulang-ulang secara konsisten, oleh orang-orang yang cukup berbeda-beda, akhirnya gadis tersebut akan merasa dan bertindak seperti seorang yang cantik.

Ada bukti riset yang meyakinkan bahwa orang-orang cantik sebenarnya lebih dimanjakan dan dipandang lebih pandai, lebih altruistic, dan lebih dipuja daripada orang lain. Orang-orang cantik sering tampak lebih tenang dan percaya diri daripada orang bermuka-buruk, karena mereka dinilai dari. diperlakukan berbeda. Namun, seorang gadis cantik sekalipun tidak akan pernah benar-

benar yakin bahwa ia cantik kalau, dari awal hidupnya, orang tua bersikap kecewa dan apologetis terhadap gadis itu dan memperlakukannya sebagai anak yang tidak menarik. Gambaran diri seseorang tidak pernah berkaitan dengan fakta-fakta yang obyektif.

Ada tiga langkah dalam proses pembentukan cermin diri (Damsar, 2011): (1) Persepsi kita tentang bagaimana kita memandang orang lain. (2) Persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita memandang. (3) Perasaan kita tentang penilaian-penilaian ini. Oleh karena itu, kita terus menerus memperbaharui persepsi kita tentang bagaimana kita memandang. Misalkan bahwa setiap kali anda memasuki suatu ruangan dan mendekati sekelompok kecil orang, mereka segera berhenti berbicara dan memandangi anda. Apakah pengalaman ini, yang berulang beberapa kali, mempengaruhi perasaan anda tentang diri anda? Atau setiap kali anda muncul, kelompok yang berbincangbincang dengan segera mengelilingi anda, bagaimana perhatian ini mempengaruhi perasaan diri anda? Wanita yang pasif adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan pada masa kecilnya bahwa mereka tidak dapat aktif dalam berbicara.

Kita perhatikan bahwa persepsi penilaian orang lainlah yang menjadi faktor yang aktif dalam proses pembentukan gambaran diri. Bisa saja kita salah duga tentang tanggapan orang lain. Mungkin saja pujian yang kita tanggapi hanyalah semacam sanjungan, cacian lebih mungkin disebabkan oleh kepusingan boss daripada disebabkan

oleh kesalahan kita sendiri. Maka kesan bayangan yang kita fahami dapat dengan mudah berbeda dengan gambaran yang sebenarnya yang dibentuk oleh orang lain tentang diri kita. Beberapa usaha dalam riset telah mencari bukti-bukti empiric tentang korelasi antara persepsi seseorang mengenai penilaian orang lain dengan penilaian yang sebenarnya mereka buat tentang orang itu.

Penelitian-penelitian ini menemukan variasi-variasi yang menyolok antara persepsi individual tentang bagaimana orang lain menggambarannya dengan gambaran yang benar-benar mereka pegang. Calvin dan Holtzman menemukan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam merasakan secara tepat pendapat orang lain tentang mereka, dan bahwa orang yang kurang mampu menyesuaikan dirinya pandangan-pandangannya juga kurang akurat.

b. Mead dan Konsep Generalisasi Orang Lain (Horton dan Hunt, 1987:59)

Proses penghayatan sikap orang lain telah digambarkan dengan tepat oleh George Herbert Mead (Horton dan Hunt, 1987 Hal: 59) yang telah mengembangkan konsep generalisasi orang lain. Generalisasi orang lain ini terdiri dari harapan-harapan yang diyakini seseorang diharapkan orang lain daripadanya. Kalau seseorang berkata: "Setiap orang mengharapkan saya untuk..." seseorang memakai konsep generalisasi.

Kesadaran akan generalisasi orang lain berkembang melalui proses pengambilan peran dan permainan peran. Pengambilan peran

(role taking) adalah suatu usaha untuk memainkan perilaku yang diharapkan dari seorang yang benar-benar memegang peranan yang diambalnya. Dalam permainan, anak-anak banyak pengambilan peran, seperti ketika mereka berpura-pura sebagai suatu keluarga (kamu jadi mama dan saya akan menjadi papa dan kamu menjadi bayi), sebagai polisi dan pencuri, bermain dengan boneka. Permainan peran (role playing) adalah pemeranan perilaku suatu peran yang betul-betul dipegang oleh seseorang (misalnya, ketika anak laki-laki dan perempuan tadi menjadi ayah dan ibu), sedangkan pada pengambilan peran seseorang hanya berpura-pura memegang peran itu.

Mead melihat adanya tiga proses bertingkat melalui mana seseorang belajar memainkan peran dewasa. Yang pertama adalah masa persiapan (1-3 tahun), di mana anak-anak meniru, perilaku orang dewasa tanpa pengertian yang nyata (misalnya, seorang ahli bangunan, menumpuk balok-balok satu dengan lainnya, dan sesaat kemudian ia merusaknya, atau pada suatu ketika ia menjadi polisi dan sesaat kemudian seorang astronot. Akhirnya tahap permainan, (4 sampai 5 tahun dan di atas 5 tahun) di mana perilaku peran menjadi menetap dan memiliki tujuan dan anak itu mampu merasakan peran pemain lain. Untuk bermain baseball, setiap pemain harus mengerti perannya sendiri dan juga peran pemain lain. Oleh karena itu, melalui permainan anak-anak, seseorang mengembangkan kemampuan melihat perilakunya sendiri dalam kaitannya dengan orang lain dan merasakan tanggapan orang lain yang terlibat.

c. Freud dan Diri Antisocial Horton dan Hunt, 1987: 65)

Baik Cooley maupun Mead adalah interaksionis, yang memandang kepribadian dibentuk melalui interaksi sosial dengan orang-orang lain. Keduanya mengasumsikan keselarasan yang mendasar antara diri dan masyarakat. Untuk Cooley "individu yang terpisah" adalah suatu gagasan yang abstrak yang tidak mempunyai eksistensi bila terpisah dari masyarakat, sama seperti "masyarakat" tidak mempunyai arti bila terpisah dari individu. "Sosialisasi diri" tersebut dibentuk oleh masyarakat, dan masyarakat adalah suatu organisasi dari orang-orang yang disosialisasikan. Maka diri dan masyarakat merupakan dua segi dari suatu persoalan yang sama.

Freud melihat diri dan masyarakat dalam konflik yang mendasar yang tidak selaras. Ia melihat diri itu sebagai produk dari cara-cara masyarakat memandang dan menahan motif dan dorongan manusia yang mendasar. Freud yakin bahwa porsi rasional dari motif manusia adalah seperti bagian gunung es yang terlihat, motif yang lebih luas tersimpan dalam kekeuatan-kekuatan yang tidak disadari dan tidak tampak yang kuat memperngaruhi perilaku manusia.

Freud membagi diri tersebut menjadi 3 bagian: Id, super ego dan ego. Id adalah pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluriah dan tidak sosial, rakus dan anti sosial; super ego meruakan adalah kompleks dari cita-cita dan nilai-nilai sosial yang dihayati seseorang dan membentuk hati nurani; sedangkan ego adalah bagian yang bersifat sadar dan rasional yang mengatur pengendalian super ego terhadap id.

Maka ego merupakan pusat kendali, siper ego sebagai perwira polisi dan id adalah tungku mendidih dari nafsu yang egois dan merusak. Karena masyarakat menghambat pengungkapan agresi, nafsu seksual, dan dorongan-dorongan lain, id selalu berperang dengan superego. Id biasanya ditekan, tetapi sewaktu-waktu ia lepas menentang superego, sehingga menyebabkan beban rasa bersalah yang sulit dipikul oleh diri. Pada waktu lain tenaga id muncul dalam bentuk terselubung yang memungkinkan ego bertindak tanpa penyebab yang disadari, misalnya kalau orang tua melampiaskan rasa permusuhan dengan memukul anak, dengan keyakinan bahwa ini dilakukan "demi kebajikannya". Jadi menurut Freud diri dan masyarakat Bering berlawanan clan bukan hanya sekedar merupakan segi-segi yang berbeda dari hal-hal yang sama.

Teori Freud telah mengilhami pertentangan-pertentangan pahit, "mazhab" yang bersaing, dan sejumlah interpretasi dan perubahan. Konsep-konsepnya lebih merupakan cara-cara memandang kepribadian daripada sebagai kesatuan yang nyata yang dapat dicek melalui eksperimen khusus. Tidak ada test empiris yang sederhana yang dapat dipergunakan untuk menetapkan apakah superego, ego dan id merupakan konsep yang mungkin yang terbaik untuk dipergunakan dalam menggambarkan bagian-bagian dari pribadi, manusia. Usaha pengujian empiris telah gagal menegaskan banyak teori Freud, meskipun menawarkan beberapa dukungan untuk yang lain. Kebanyakan ilmu sosial masa kini setuju bahwa

Freud mungkin benar dalam klaimnya bahwa motif-motif manusia sebagian besar tidak disadari dan di luar kendali rasional dan tidak selaras dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara tertib.

Walaupun Cooley dan Mead memaparkan perkembangan diri dalam istilah yang sedikit berlainan, teori mereka lebih bersifat saling melengkapi daripada bertentangan satu sama lain. Keduanya bertentangan dengan Freud dalam arti bahwa mereka memandang diri dan masyarakat sebagai dua aspek dari realitas yang sama, padahal Freud memandang diri dan masyarakat dalam konflik yang abadi. Namun selalu memandang diri sebagai suatu produk masyarakat, dibentuk dan dicetak oleh masyarakat.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pancasila merupakan suatu topik yang sudah sering diangkat dalam penelitian, mengingat Pancasila merupakan suatu gagasan yang fenomenal. Namun pada era sekarang ini Pancasila sudah mulai redup dari dunia akademik. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, ada yang menganggap Pancasila abstrak, ada juga yang mengatakan Pancasila harus dikemas lagi sesuai perkembangan zaman. Untuk itu kami selaku peneliti mencoba untuk menggali lagi nilai yang ada dalam Pancasila, khususnya nilai toleransi yang memang ada kaitannya dengan ahlak terpuji. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dekat atau selaras dengan apa yang kami teliti, antara lain:

Skripsi karya Nurul Hidayatul Wahidah, jurusan pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2014

yang berjudul” *Nilai-Nilai Moral dalam Teks Pancasila dan Relevansinya terhadap Materi Pendidikan Ahlak*”.

Yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah bahwa dalam penelitian yang ditulis oleh Nurul Hidayatul meneliti tentang nilai moral yang terkandung dalam teks pancasila dan relevansinya. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti meneliti tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayatul, yaitu meneliti tentang nilai yang terkandung dalam Pancasila namun pada penelitian Nurul Hidayatul lebih spesifik yaitu membahas tentang nilai moral yang ada dalam teks pancasila dan relevansinya.

Skripsi karya Diah Chintia, jurusan pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul *”Implementasi Konsep Tauhid Sosial dalam dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMA”*.

Perbedaan dalam penelitian karya Diah ini membahas tentang nilai konsep tauhid sosial yang dikaitkan dengan pengembangan kurikulum PAI sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti meneliti tentang nilai dalam Pancasila yang dikaitkan dengan pembentukan kepribadian siswa. Jadi dari sekripsi karya Diah memiliki perbedaan dalam objek formalnya.

Kesamaan dalam skripsi Diah ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

Skripsi karya Muhtar Salim Rido, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul “*Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Sekolah*”.

Yang membedakan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut adalah bagaimana penelitian yang dilakukan saudara Muhtar terfokus pada aktualisasi nilai Pancasila di sekolah. Dimana pada penelitian tersebut membahas bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila di sekolah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencoba membahas pengamalan nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa di SDN Mergoasri. Jadi jelas variabel dari kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan.

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhtar Salim Rido dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang nilai-nilai pancasila.

Jurnal yang di tulis oleh Reva Sonia Izati, jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jakarta tahun 2013 yang berjudul “*Implementasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Perilaku Nasionalisme Siswa (studi deskriptif kualitatif di SMA Negeri 1 Sukatani)*”. Yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini memiliki tujuan implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap perilaku Nasionalisme sedangkan dari penelitian peneliti memiliki tujuan mengamalkan nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa. Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang nilai-nilai pancasila.

Artikel yang di tulis oleh Muhammad Masrurri, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2012

yang berjudul “*Hubungan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dengan Kenakalan Remaja di Dusun Selorejo Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto*”. Pada artikel yang ditulis oleh Masrurri mengangkat hubungan nilai-nilai Pancasila dengan kenakalan remaja sedangkan, penelitian yang ditulis oleh peneliti membahas pengamalan nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa. Jadi ada variabel yang membedakannya yaitu pembentukan kepribadian siswa. Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan tinjauan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan hasil-hasil penelitian diatas. Perbedaannya bahwa penelitian ini terfokus pada pengamalan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan tingkat SD yang kemudian dikaitkan dengan pembentukan kepribadian siswa.

C. Kerangka Berpikir

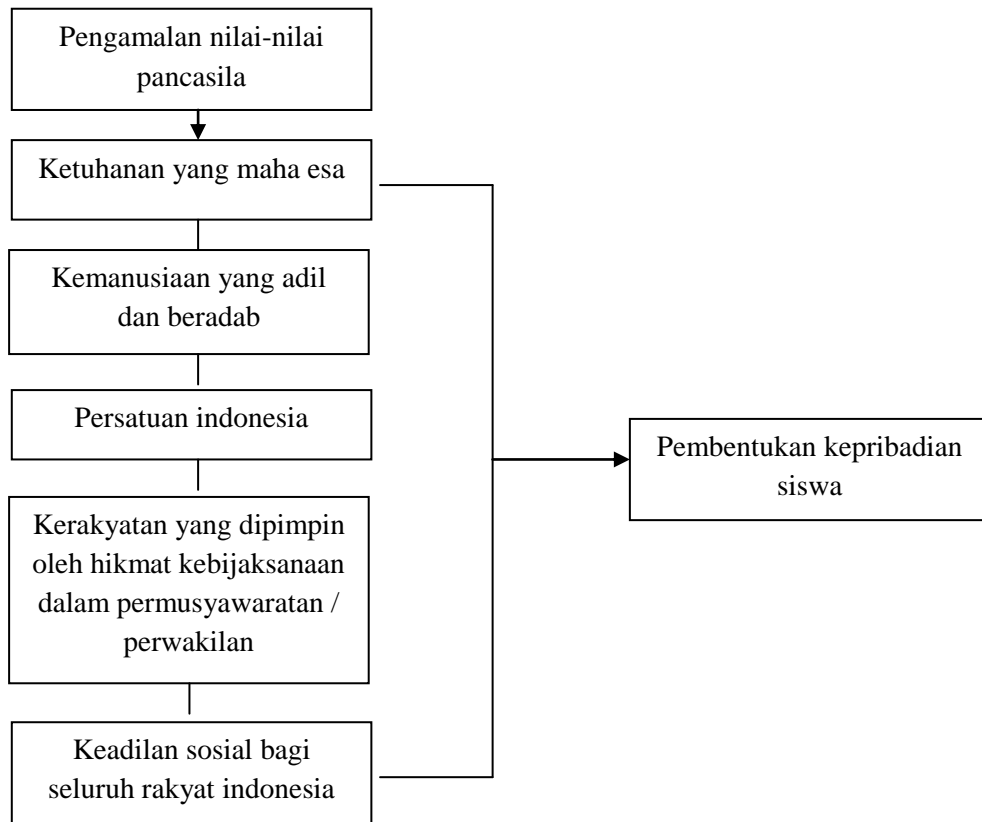
Setiap orang diharapkan mempunyai kepribadian yang baik. Dengan mempunyai kepribadian yang baik maka orang tersebut akan mempunyai perilaku yang baik. Pembentukan kepribadian akan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai bangsa Indonesia tentu saja kita juga harus memiliki kepribadian yang baik juga. Kepribadian yang relevan untuk dijadikan pedoman adalah pengamalan Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia mempunyai nilai-nilai karakter yang lengkap dan sangat

relevan untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan karakter. Karena sebenarnya karakter itu bisa dibentuk dan dikembangkan. Salah satunya melalui jalur pendidikan. Namun tidak semua sekolah menggelar pendidikan karakter, sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan untuk membentuk karakter siswa. Yakni karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai karakter juga diintegrasikan dalam setiap pembelajaran mata pelajaran.

Melalui materi Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas V maka hal ini akan meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila siswa kelas V. Dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang baik maka siswa diharapkan akan mempunyai karakter yang baik juga dan sesuai dengan karakter Pancasila. Karena pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter siswa. Dengan pemahaman yang baik maka siswa diharapkan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan terbentuk karakter yang baik juga. Oleh karena itu pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat penting karena akan mempunyai hubungan dengan karakter yang dimiliki oleh siswa.

Berikut ini skema pemikiran



Gambar 1 : Kerangka berpikir

Nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan bernegara. Berikut ini adalah uraian dari nilai-nilai Pancasila :

Sila pertama dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai religius seperti yang diuraikan sebagai berikut: Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-Nya Yang Maha Sempurna, Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, Kepercayaan adanya nilai-nilai dari ajaran agama yang harus ditaati demi kebahagiaan hidup manusia, Nilai ketuhanan sebagai nilai religius meliputi dan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Sila kedua dengan rumusan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai kemanusiaan seperti yang diuraikan sebagai berikut: Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak asasinya, Perlakuan adil terhadap sesama dengan memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya, Manusia beradab dengan cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai hidup manusiawi, Nilai kemanusiaan diliputi dan dijiwai ketuhanan serta meliputi dan menjiwai persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Sila ketiga dengan rumusan ”Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dan kebangsaan seperti yang diuraikan sebagai berikut: Persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia dengan dasar cita-cita hidup bersama, Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, Semangat ke”Bhineka Tunggal Ika”an suku bangsa untuk memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa, Nilai persatuan diliputi dan dijiwai ketuhanan dan kemanusiaan, meliputi dan menjiwai kerakyatan dan keadilan.

Sila keempat dengan rumusan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengandung nilai kerakyatan seperti yang diuraikan sebagai berikut: Kedaulatan negara di tangan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berlandaskan penalaran yang sehat, Manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama,

Musyawarah mufakat dalam kenegaraan oleh wakil-wakil rakyat demi kebersamaan dengan dasar kekeluargaan, Nilai kerakyatan diliputi dan dijiwai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan serta meliputi dan menjiwai keadilan.

Sila kelima dengan rumusan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung nilai keadilan sosial seperti yang diuraikan sebagai berikut: Keadilan dalam kehidupan sosial meliputi semua bidang nasional untuk seluruh rakyat, Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual merata bagi seluruh rakyat Indonesia, Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta cinta kemajuan dan pembangunan yang selaras serasi dan seimbang, Nilai keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan.

Dari tinjauan sudut pandang yang berbeda ini, mempunyai sikap yang sama dalam melihat nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan dasar filsafat Negara yang mempunyai konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang berhubungan antarsila dalam Pancasila. Dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang baik maka hal tersebut diharapkan akan mempunyai hubungan yang positif dengan pembentukan kepribadian siswa. Sehingga dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang baik pembentukan kepribadian siswa yang dihasilkan juga baik. Begitu juga sebaliknya, jika pengamalan nilai-nilai Pancasila siswa buruk maka pembentukan kepribadian yang dimiliki siswa tersebut akan buruk juga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk didapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan (Sugiyono, 2015:6).

Penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sugiyono dalam bukunya menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Proses pembelajaran akan berlangsung dalam setting alami (natural setting) penelitian diarahkan ada kondisi aslinya dimana subjek penelitian berada. Kondisi subjek tidak disentuh oleh perlakuan khusus yang dikendalikan peneliti. Pada saat pengumpulan data, peneliti melakukan kontak langsung dengan subjek penelitian agar dapat mengamati sikap, perilaku dan pendapat subyek secara langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena lebih mementingkan proses dari pada hasil, dengan membatasi penelitian dengan fokus dan memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat, mempelajari suatu proses atau penemuan secara alami, mencatat menganalisis, manafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilaksanakan di SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V. Beberapa alasan yang membuat peneliti memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian yaitu sebagai berikut :

1. SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban telah menerapkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PKn.
2. SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
3. Belum pernah diadakan penelitian tentang implementasi pengalaman nilai-nilai pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa kelas V SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
4. SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban memiliki potensi pada peningkatan kualitas sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat pada sekolah tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (2012) adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran

peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

Menurut Sugiyono (2011:306), peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2011:307-308), kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian kualitatif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrumen dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perelakan.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga Juli tahun 2019 yang berawal dari pengajuan izin penelitian. Surat izin penelitian dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP PGRI Bojonegoro. Melalui Surat izin tersebut memulai penelitian dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Wakil-wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Guru-guru wali kelas, pengawas sekolah, serta ketua komite sekolah dalam kurun waktu Februari hingga Maret 2019. Pengamatan terhadap sarana dan prasarana, aktifitas manajemen dalam implementasi juga dilakukan selama periode tersebut.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sumber data yaitu teknik Purposive Sampling karena keingintahuan peneliti tentang bagaimana implementasi pengalaman nilai-nilai pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa kelas V SDN Mergoasri Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat implementasi pengalaman nilai-nilai pancasila. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibrahim bahwa Purposive Sampling digunakan pada situasi dimana peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakan wawancara guna memperoleh informasi secara mendalam tentang suatu hal (Ibrahim, 2015:72). Oleh karena itu, peneliti memilih siswa kelas V sebagai subjek penelitian. Adapun jumlah guru yang dipilih sebagai subjek penelitian terdiri dari 1 orang guru PKn/PPKn.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh suatu pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian yang diamati, maka pengumpulan dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Metode observasi dilakukan oleh peneliti adalah partisipatif bentuk pasif untuk mengamati perilaku yang muncul di lokasi penelitian. Dalam observasi ini peneliti hanya mendatangi lokasi penelitian, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif. Dalam observasi ini peneliti mengamati kegiatan guru dalam mengimplementasikan pengalaman nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa secara wajar dan sebenarnya terjadi tanpa usaha yang disengaja untuk memperbaharui, mengatur atau memanipulasinya. Mengadakan observasi hendaknya dilakukan sesuai kenyataan, melukiskannya secara tepat dan cermat terhadap apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dengan baik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Teknik mengkaji dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencatat apa yang tertulis dalam dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, kemudian berusaha untuk memahami maknanya. Adapun dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari pengamalan nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan kepribadian siswa kelas V yang dicatat dari hasil wawancara.

3. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari guru PKn yang diteliti mengenai suatu masalah khusus. Penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan teknik wawancara tak terstruktur yaitu tidak

menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan memuat pertanyaan-pertanyaan permasalahan secara garis besar. Pedoman wawancara digunakan untuk mendalami upaya yang telah dilakukan subjek dalam menerapkan nilai-nilai pancasila dan untuk mencari hambatan apa yang dihadapi dalam mengembangkan nilai-nilai pancasila di kelas terhadap pembentukan kepribadian siswa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dan setelah selesai di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Aktifitas analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing / verification. Langkah-langkah analisis sebagai berikut : (Sugiyono, 2015:247).

1. Data reduction (mereduksi data)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Sehingga data yang direduksi akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka data yang diperolehpun semakin rumit, untuk itu diperlukan reduksi data sehingga data yang diperoleh lebih sederhana dan mempermudah analisis data.

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu diperlukan reduksi data untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memecahkan masalah. Dalam mereduksi data peneliti dipandu oleh pertanyaan penelitian yang harus dijawab, jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan temuan penelitian. Proses reduksi data dilakukan saat peneliti menemukan data yang belum jelas dan belum memiliki pola dengan tujuan agar peneliti lebih memahami makna yang terkandung dalam data tersebut.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data terkumpul dan direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data yang telah diperoleh dari hasil reduksi data secara naratif sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan keputusan pengambilan tindakan. Pada tahap ini, peneliti menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena yang diperoleh untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat dievaluasi untuk dapat merencanakan tindakan lebih lanjut untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data dalam suatu pola tertentu dan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuat suatu kesimpulan penelitian.

3. *Conclusions drawing / verification* (menarik kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil akhir dan evaluasi. Kegiatan penarikan kesimpulan ini mencakup pencarian makna data dan memberikan penjelasan. Setelah diperoleh data maka dibuat kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung dalam pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti ilmiah yang disebut verifikasi data. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka peneliti melakukan pemeriksaan data. Data yang telah dikumpulkan diuji keabsahannya dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, menekuni pengamatan, triangulasi. Perpanjangan keikutsertaan berarti perpanjangan waktu penelitian agar peneliti memiliki cukup waktu untuk mengenal lingkungan, mengadakan hubungan dengan orang-orang dalam lingkungan itu dan mengecek kebenaran informasi. Menekuni pengamatan dilakukan untuk memperoleh keakuratan data penelitian yang lebih baik. Dengan ketekunan pengamatan maka peneliti dapat memperhatikan segala sesuatunya dengan lebih cermat, terinci dan mendalam.

Triangulasi (teknik pemeriksaan keabsahan) dilakukan untuk mempertinggi validitas dan memperdalam hasil penelitian. Untuk menjamin validitas data maka dilakukan triangulasi metode. Triangulasi metode yaitu kesesuaian informasi yang diperoleh dengan metode yang berbeda yaitu antara dokumentasi, observasi dan wawancara.